

### **BAB III**

## **DINAMIKA MASALAH ANAK DALAM KONFLIK REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

BAB III membahas secara singkat mengenai negara Republik Afrika Tengah dan menjelaskan perang saudara yang terjadi. Kemudian dalam bab ini juga membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian.

#### **A. Sejarah Konflik Agama dan Sipil di Republik Afrika Tengah**

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Kamerun. Negara ini dulunya merupakan bekas jajahan Prancis yang diberi nama Ubangi-Shari hingga tahun 1960 (DR. Sidik Jatmika, 2016). Republik Afrika Tengah seakan tidak pernah lepas dari konflik dan krisis kemanusiaan sejak kemerdekaannya dari Prancis. Konflik yang terjadi berawal dari pertikaian politik yang menjurus pada konflik agama, bahkan kini mengarah kepada pembersihan etnis secara massal atau genosida. Politik di negara tersebut pada akhirnya terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Anti-Balaka yang didominasi masyarakat Kristen dan Seleka yang didominasi masyarakat Muslim (Al Jazeera, 2014).

**Gambar 3.1**  
**Bendera Negara Republik Afrika Tengah**



Sumber:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Central\\_African\\_Republic](https://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_Republic)

Awal mula terjadinya konflik ini saat di mana Francois Bozize yang saat itu terpilih untuk menjabat sebagai presiden Republik Afrika Tengah pada tahun 2011. Pada tahun 2003, Francois Bozize juga pernah menduduki jabatan yang sama. Keberhasilan Francois Bozize menjadi presiden tidak bisa lepas dari adanya peran bantuan kudeta militer dari Chad (BBC News, 2014). Pada saat itu hubungan antara Chad dan Republik Afrika Tengah bisa dibilang sangat baik. Bahkan, presiden Chad, Iddris Deby mengirimkan bantuan pasukan militer untuk melindungi pemerintahan Francois Bozize. Namun, kepemimpinan Francois Bozize mendapatkan banyak protes dari rakyat dikarenakan adanya tuduhan korupsi dan eksploitasi yang dilakukannya untuk kepentingan pribadi.

Faktor lain yang mendorong protes tersebut dikarenakan Francois Bozize telah melanggar kesepakatan *Convention of Patriots for Justice and Peace* (CPJP) pada tahun 2011 (CBC Associated Press,

2014). Kesepakatan itu merupakan perjanjian gencatan senjata yang dilakukan pada tahun 2011 antara pemerintahan Republik Afrika Tengah dengan pemberontak sejak tahun 2004. Pada akhirnya, pemberontak CPJP mengikuti kubu militan Seleka dan melakukan pemberontakan untuk menjatuhkan pemerintahan Francois Bozize (Global Security, 2013).

Pada Desember 2012, Francois Bozize mendesak kepada Prancis dan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan untuk menangani pemberontakan di Bangui. Namun, Presiden Prancis pada saat itu, Francois Hollande menegaskan bahwa bantuan pasukan yang diberikan oleh Prancis hanya untuk membantu mengatasi konflik dan melindungi Republik Afrika Tengah, bukan untuk melindungi pemerintahan Francois Bozize. Pada tahun 2013, kelompok militan melakukan pemberontakan menuju ibukota Republik Afrika Tengah untuk menjatuhkan kepemimpinan Francois Bozize. Masa ketika waktu itu sangat banyak dan anarkis sehingga membuat Francois Bozize melarikan diri ke Kamerun karena adanya ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Pelarian Francois Bozize tersebut menimbulkan kekacauan akibat kekosongan politik. Pihak Seleka juga saling berdebat untuk memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin di Republik Afrika Tengah. Hingga pada akhirnya, Michel Djotodia yang merupakan pimpinan pemberontak Seleka mengajukan diri dan mengangkat secara sepihak sebagai presiden Republik Afrika Tengah. Michel Djotodia membuat pernyataan tersebut melalui *Radio France International* dan mengangkat Nicholas Tiangaye sebagai Perdana Menteri Republik Afrika Tengah (Dukhan, 2014).

Naiknya jabatan Michel Djotodia tidak membuat keadaan politik di Republik Afrika Tengah semakin membaik. Meskipun Michel Djotodia telah

menjanjikan jabatannya hanya akan berlangsung selama tiga tahun dan tahun setelahnya akan diadakan pemilu. Pada Maret 2013, terciptalah kubu Kristen yang menamai diri mereka sebagai militan Anti-Balaka dan melakukan pemberontakan karena kelompok ini tidak mengakui Michel Djotodia sebagai pimpinan yang sah, terlebih lagi Michel Djotodia berasal dari kaum minoritas Muslim yang menjadi presiden (BBC News, 2014). Sejak saat itu, konflik yang ditimbulkan oleh dua kubu militan Seleka dan Anti-Balaka tadi menimbulkan krisis bagi stabilitas politik dan keamanan, pelanggaran nilai-nilai HAM dan demokrasi di Republik Afrika Tengah akibat adanya peperangan kelompok bersenjata, pembantaian besar-besaran pada warga sipil, kanibalisme, penghancuran masjid-masjid dan bangunan-bangunan.

Faktor lain yang menjadi pemicu penyerangan yang dilakukan oleh Anti-Balaka adalah karena Nichloas Tiangaye dalam pemerintahan Michel Djotodia tidak bersikap adil dalam pembagian komposisi pemerintahan dengan menempatkan Seleka pada posisi 8 dari 10 anggota partai yang merupakan oposisi Francois Bozize. Sedangkan asosiasi Francois Bozize hanya menempati 1 dari 10 anggota yang ada. Sisanya adalah anggota-anggota sipil yang menempati 16 posisi. Kelompok Anti-Balaka yang merupakan pendukung Francois Bozize mengancam akan memboikot pemerintahan karena protes pembagian komposisi kekuasaan yang tidak adil ini. Mereka berargumen bahwa 16 posisi yang diberikan sebagai perwakilan warga sipil juga dikendalikan oleh aliansi Seleka yang menyamar sebagai aktivis sosial (Dukhan, 2014).

Konflik yang terjadi pada mulanya berakar pada kesenjangan politik dan ekonomi yang berujung pada kekerasan sektarian yang terjadi hampir di semua

wilayah Republik Afrika Tengah. Mayoritas masyarakat Republik Afrika Tengah 80% menganut agama Kristen menganggap bahwa Seleka adalah orang asing di negaranya. Serangan-serangan milisi telah menyebabkan warga Muslim meninggalkan tempat asal mereka dalam skala yang cukup besar dan belum pernah terjadi sebelumnya (UNICEF, 2016).

Pada April 2013, para pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Afrika mengadakan pertemuan di Chad dan tidak mengakui Michel Djotodia sebagai presiden. Mereka hanya mengakui Michel Djotodia sebagai pimpinan sementara transisi politik sebelum adanya pemilu lagi 18 bulan ke depan. Kemudian pemberontakan terus terjadi sejak saat itu yang tidak terlepas dari peran Francois Bozize yang menginginkan perebutan kekuasaan kembali. PM Nicholas Tiangaye mengajukan permohonan ke Dewan Keamanan PBB untuk menangani pemberontakan tersebut. Atas permintaan tersebut, operasi pasukan perdamaian dilakukan oleh beberapa pihak mengirimkan ribuan pasukannya untuk mengatasi keriuhan yang terjadi, seperti PBB melalui *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in The Central African Republic* (MINUSCA), Uni Afrika melalui *The African-led International Support Mission to the Central African Republic* (MISCA), dan Prancis melalui Operasi Sangaris (CBC Associated Press, 2014).

Pada kenyataannya, tidak terdapat satu pun rezim demokratis yang dibangun di kawasan Afrika Tengah; otokrasi adalah rezim yang mendominasi selama periode setelah merdeka, di mana partisipasi masyarakat sangat dibatasi. Kompleksitas konflik regional di kawasan Afrika Tengah juga turut mempengaruhi peningkatan konflik di wilayah Republik Afrika Tengah, hingga menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di negara tersebut.

Dari data yang diperoleh, dari total populasi sebanyak 4,6 juta jiwa, sekitar 1 juta jiwa telah mengungsi, dan 2,5 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin.

**Gambar 3.2**  
**Peta Kelompok Seleka dan Anti-Balaka**



Sumber:

<https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/map-car-2015-1.jpg>

Diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Populasi Muslim di Bangui juga telah menurun secara drastis dari 130.000 jiwa sejak tahun 2013, menjadi hanya 900 jiwa pada pertengahan tahun 2014. Untuk jangka waktu setahun, penurunan ini merupakan angka yang sangat mengejutkan. Hingga September 2014, konflik kekerasan yang terjadi telah menelan korban jiwa sebanyak lebih dari 5.000 jiwa (UNICEF, 2015). Jutaan orang telah kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga akibat kekerasan yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari hilangnya tempat tinggal tersebut

adalah mereka terpaksa menjadi pengungsi di daerah-daerah perbatasan. Tidak jarang masalah pengungsian ini menimbulkan permasalahan baru baik bagi para pengungsi maupun negara-negara tetangga yang mereka tuju, yang pada akhirnya mendukung terjadinya instabilitas di kawasan Afrika Tengah (UNICEF, 2017).

Konflik antaretnis beragama Muslim Seleka, dan etnis beragama Kristen Anti-Balaka tidak dapat dihindarkan. Seleka memulai serangan terhadap kelompok Kristen, dan pada akhirnya Anti-Balaka melakukan serangan balik terhadap Seleka dan penduduk Muslim di hampir seluruh wilayah Republik Afrika Tengah dengan populasi yang sangat masif, dan korban tak hanya berasal dari kelompok yang berkonflik tetapi masyarakat sipil juga terkena dampaknya terutama kalangan orang tua, perempuan, dan anak-anak (DR. Sidik Jatmika, 2016).

Menurut Amnesty International, yang telah melakukan pengumpulan data terkait konflik di mana terdapat pembersihan etnis besar-besaran di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, hal tersebut dilakukan untuk membalas dendam atas pembunuhan penduduk Kristen yang dilakukan oleh kelompok Seleka dan sebagian kelompok Muslim di Republik Afrika Tengah. Hampir 100 masyarakat Muslim terbunuh di pembersihan etnis paling mematikan yang terjadi pada Januari 2014 (Amnesty International, 2016).

PBB kemudian mengirimkan pasukan perdamaianya pada Desember 2013, yang berasal dari negara-negara Afrika dan Perancis. Mayoritas masyarakat Muslim telah mengungsi ke negara terdekat seperti Chad dan negara-negara di sekitar Republik Afrika Tengah. Kejahatan kemanusiaan, pembersihan etnis, dan genosida yang terjadi di Republik Afrika Tengah ini adalah sebuah konflik yang rumit. Di mana

konflik diawali dengan perebutan kekuasaan politik yang berujung pada kekerasan komunal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama di Republik Afrika Tengah (UNICEF, 2014).

## **B. Dampak Konflik Sipil Terhadap Anak**

Tidak dapat dimungkiri lagi, dalam situasi konflik maupun perang, warga sipil baik dewasa maupun anak-anak secara langsung juga ikut terlibat di dalamnya, karena mereka merupakan bagian dalam konflik. Di setiap konflik yang terjadi di dunia memiliki dampak yang tentunya tidak bisa dihindarkan terutama bagi anak-anak, dampak tersebut antara lain (Henry Kam Kah, 2014):

### **1. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Dalam konflik bersenjata, sebuah tatanan sosial dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi. Menjadi pengungsi bagi seorang anak merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Selain harus mengungsi dari tempat tinggal mereka, anak-anak juga harus menghadapi tantangan yang sangat serius saat menjalani pengungsian dan tumbuh dalam kondisi yang tidak normal di antara lain adalah kesulitan dalam mengamankan kebutuhan dasar mereka seperti mendapatkan makanan yang memadai, air minum bersih, tempat tinggal yang layak dan pakaian untuk dipakai sehari-hari (Elizabeth Stuart, 2013). Dengan hidup dalam ketegangan dan minimnya keamanan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Mereka juga harus berebutan dengan pengungsi lain untuk mendapatkan makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.

Bagi anak-anak, dampak dari konflik bersifat sangat luas dan bersifat jangka pendek



maupun jangka panjang. Kondisi perang membuat ekonomi negara sangat terganggu, karena negara harus memprioritaskan keamanan daripada yang lainnya. Dalam kondisi perang sistem ekonomi sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik. Peluang kerja untuk mendapatkan pendapatan seperti bertani, berjualan di pasar, bekerja di kantor dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan ketika situasi dalam kondisi perang (Fitrah E, 2015).

Dalam jangka waktu pendek konsekuensi ekonomi dari perang terhadap anak terdapat pada penanggung jawab ekonomi keluarga. Dengan kata lain, anak ikut mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun dalam jangka waktu yang panjang konsekuensi ekonomi yang dirasakan oleh anak adalah ketika mereka hidup dan tumbuh di saat perang dengan kondisi negara yang hancur, maka ketika besar nanti mereka juga ikut berperan dalam membangun negara karena mereka merupakan penerus bangsa (Eberhard, M. R).

Kemunduran dan kehancuran ekonomi suatu negara akibat perang mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lapangan kerja yang sangat minim dan kebanyakan makanan dan minuman mereka dapat dari sumbangan dan donasi dari orang-orang luar yang memberikan sumbangan. Hal ini juga berdampak pada masa depan anak apabila hidup dan tumbuh besar dalam situasi miskin dan berkonflik;

## **2. Dampak Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak terlebih lagi dalam masa pertumbuhannya. Pendidikan dapat membentuk

dan membangun sebuah karakter seorang anak di masa depannya nanti. Dalam kehidupan normal, pendidikan yang diterima oleh anak-anak pada umumnya yaitu pendidikan secara akademik maupun non-akademik. Namun, sangat sulit bagi anak-anak di daerah konflik untuk merasakan bangku pendidikan karena mereka merasa tidak aman untuk berkeliaran di lingkungannya (Chonghaile, 2016).

Dalam situasi konflik bersenjata, para penduduk lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan hal yang lain. Anak-anak dan para remaja kehilangan haknya untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan karena beberapa alasan. Kondisi tersebut membuat sekolah dianggap tidak relevan karena akibat konflik yang berkepanjangan, membuat pendapatan keluarga berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Chonghaile, 2016).

Hal ini memaksa anak-anak untuk terlibat dalam mencari nafkah untuk membantu keluarga dibandingkan mengurus pendidikan atau belajar. Kemudian, ketakutan orang tua akan keselamatan anak apabila mereka berada jauh dari tenda-tenda pengungsian atau dari jangkauan orang tua untuk pergi belajar di sekolah atau di tempat yang disediakan untuk belajar pada situasi konflik (UNICEF, 2007);

### **3. Dampak Kesehatan**

Dalam kondisi konflik, masalah kesehatan memang tidak bisa dihindarkan. Perang memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kesehatan fisik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka bisa saja terkena tembakan, bom atau ranjau di Republik

Afrika Tengah dan bisa saja dilukai secara langsung oleh para tentara militer (ICRC, 2014).

Pada konflik yang terjadinya di Republik Afrika Tengah berdasarkan data *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), pada September 2014 dari 3.374 anak-anak korban yang masih hidup diperkirakan terdapat kurang lebih 1.000 anak yang mengalami cacat permanen (OCHA, 2017). Anak-anak cenderung menjadi korban karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam perang. Kurangnya obat-obatan, nutrisi, asupan makanan dan minuman yang bersih membuat proses penyembuhan berjalan lambat dan cenderung menjadi buruk (UNICEF, 2016).

Kerugian yang didapatkan oleh anak-anak semakin banyak apabila mereka mengalami cacat permanen. Akibatnya mereka tidak bisa membantu keluarga dalam mencari nafkah. Gangguan fisik juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor dan asupan nutrisi dan makanan yang kurang sehat dapat menimbulkan penyakit (UNICEF, 2016). Dan apabila penyakit itu berada ditempat pengungsian, dapat menular kepada pengungsi lain yang berada di tempat tersebut. Hal ini sudah sering terjadi pada situasi konflik di suatu negara. Sudah seharusnya ada lembaga yang siap bersedia menyediakan fasilitas yang layak bagi penyembuhan anak-anak yang sakit atau cedera.

Dampak perang terhadap kesehatan anak tidak hanya pada kesehatan fisik akan tetapi juga pada kesehatan mental dan psikologis anak. Memang pada umumnya konflik bersenjata ditandai dengan kekerasan fisik dan anak-anak

mungkin bisa saja terluka seperti yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi hal itu berlanjut kepada mental seorang anak apabila melihat teman, saudara dan atau keluarga terluka, kehilangan anggota tubuh atau terbunuh dalam perang yang disaksikannya secara langsung. Hal ini dapat mengganggu psikologis seorang anak. Bisa jadi anak tersebut menjadi trauma dan memiliki efek jangka panjang. Atau mungkin akan muncul rasa dendam dalam diri yang akan di bawa sampai tumbuh besar nanti. Pengaruh mental yang diakibatkan oleh trauma dapat merubah sifat, karakter dan perilaku seorang anak (OCHA, 2014).

Dampak dari perang tidak hanya kesehatan mental anak-anak merasakan tetapi orang dewasa yang merawat anak pun juga bisa terpengaruh mentalnya. Pada situasi konflik, tingkat kekerasan dalam keluarga bisa saja meningkat karena adanya trauma, tekanan ekonomi dan faktor lain yang memicu kekerasan dalam keluarga (Global Humanitarian Assistance, Defining Humanitarian Aid). Ketika kekerasan dalam keluarga meningkat akibat kondisi perang, kesehatan mental anak pun mulai bertambah dan semakin tertekan. Hal ini membutuhkan adanya terapi dari pihak-pihak ahli yang mengerti tentang psikologis anak atau semacamnya (UNICEF, 2015).

Dampak jangka panjang yang di akibatkan perang terhadap anak ini akan sulit dilupakan oleh mereka sampai kapanpun, karena mereka kehilangan banyak hal akibat perang. Dibutuhkan lembaga-lembaga atau negara untuk membantu melindungi para korban perang khususnya anak-anak agar mereka dapat

mendapatkan hak-hak mereka secara layak dan adil (UNICEF, 2017).

### **C. Kasus Pelecehan Seksual Anak di Republik Afrika Tengah**

Konflik yang terus terjadi di Republik Afrika Tengah membuat PBB mengirimkan tentara perdamaiannya dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi warga sipil yang berada di tengah konflik bersenjata wilayah terkena dampak konflik. Tingkat ketidakamanan yang tinggi membuat situasi di Republik Afrika Tengah sangat tidak aman bagi anak-anak dan perempuan. Beberapa tahun belakangan PBB mendapat laporan bahwa pasukan penjaga perdamaian yang mereka kirim di Republik Afrika Tengah telah melakukan tindakan yang melanggar HAM yaitu pelecehan seksual terhadap warga sipil terutama anak-anak di wilayah konflik tersebut (Relations, 2015).

### **Gambar 3.3**

#### **Salah Satu Gambar Korban Pelecehan Seksual**



Sumber:

<https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/28/broken-promises-children-bangui-reports-peacekeepers-abuse-central-african-republic>

Diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Kasus pelecehan seksual ini terjadi ketika negara sedang dihadapkan dengan kudeta-kudeta yang membahayakan kehidupan warga sipil. Pelecehan ini dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian yang sedang menjalankan misi perdamaianya di Republik Afrika Tengah. Pasukan penjaga perdamaian masuk ke negara ini sebagai pasukan yang bertugas dalam menjaga stabilitas negara (Dukhan, 2014).

PBB juga sudah mengusut dan melakukan tindak lanjut terhadap kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di Republik Afrika Tengah. PBB mengidentifikasi 41 penjaga perdamaian dari Burnudi dan Gabon sebagai dalam kasus pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Pelecehan dan

eksploitasi seksual diduga dilakukan oleh anggota pasukan *United Nation Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* (MINUSCA) pada tahun 2014 dan 2015. Dinas Pengawasan Internal PBB (*Internal Oversight Service/OIOS*) dan penyidik nasional di Burundi dan Gabon telah mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh 25 warga Burundi dan 16 warga Gabon yang bertugas di MINUSCA.

PBB telah menyerahkan kewenangan kepada kedua negara anggota untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menghukum tentara perdamaian yang terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual anak di Republik Afrika Tengah ketika mereka kembali ke negara asalnya. PBB juga sudah memberikan laporan nama-nama terduga pelaku ke OIOS untuk ditindaklanjuti dan memastikan para pelaku tersebut bertanggung jawab. Secara keseluruhan, terdapat 139 korban pelecehan seksual sudah di data dan diwawancarai.

Permasalahan ini merupakan permasalahan kemanusiaan, di mana kasus ini sudah menjadi tanggung jawab PBB dan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi para korban yang terkena dampak konflik. Solidaritas penduduk dunia untuk mengampanyekan HAM dan perdamaian akan sangat membantu para korban konflik. Kekerasan ini juga sangat berdampak terhadap populasi yang paling rentan, yaitu wanita dan anak-anak (UNICEF, 2017).

Badan anak-anak PBB mengatakan bahwa jumlah kasus yang sebenarnya diderita oleh anak-anak selama tiga bulan terakhir di Republik Afrika Tengah diperkirakan jauh lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan secara resmi (Essa, Aljazeera, 2017). Karena akses kemanusiaan di daerah tempat terjadinya konflik

sangat sulit untuk dilewati. Kondisi ini sangat mengurangi kemampuan para pekerja bantuan untuk melaporkan kasus dan membantu korban-korban pelecehan seksual. Namun, informasi yang dikumpulkan oleh UNICEF menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata sering menargetkan anak-anak selama serangan di desa-desa atau kota-kota (UNICEF, 2017).

Dalam beberapa kasus 14 anak perempuan berusia 9-16 tahun diperkosa oleh anggota kelompok bersenjata selama kekerasan terjadi baru-baru ini. Serangan-serangan ini terjadi ketika para korban meninggalkan tenda-tenda pengungsian untuk melakukan perjalanan pulang untuk barang-barang pribadi. Banyak kejahatan kekerasan seksual terus tidak dilaporkan. Dalam insiden lain lima anak berusia 2-16 tahun dibunuh secara brutal ketika mencoba menyeberangi sungai untuk mencari perlindungan di negara tetangga seperti di Republik Demokratik Kongo. Selama bulan yang sama, di sebuah desa dekat Republik Afrika Tengah, delapan anak laki-laki berusia 13-17 diculik dan satu telah terbunuh, sementara para penculik menuntut tebusan untuk membebaskan yang lain (UNICEF, 2017).

Konflik yang terus-menerus terjadi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata telah mengakibatkan ribuan anak-anak kehilangan hak yang paling dasar mereka yaitu pendidikan dan kesehatan. Diperkirakan bahwa total 94.000 anak sekolah dasar tidak dapat mengenyam pendidikan akibat dari penutupan sekolah karena kondisi yang tidak aman (UNICEF, 2006). Sementara itu, penjarahan oleh kelompok bersenjata telah menyebabkan banyak pusat kesehatan tutup, dan menghentikan perawatan penting dan imunisasi rutin untuk anak-anak.